

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penentu utama kemajuan peradaban suatu bangsa adalah pendidikan. Bangsa-bangsa yang maju dapat dipastikan selalu didukung oleh majunya praktek pendidikan di negara-negara tersebut. Kemajuan di bidang pendidikan tersebut tercermin dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di negara tersebut. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kualitas SDM suatu bangsa atau negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI/IPM adalah pengukuran perbandingan angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan pendapatan per kapita. HDI/IPM memakai skala 0 sampai 1. Dari peringkat dan angka HDI/IPM tersebut, suatu negara diketahui di dalam posisi mana tingkat kemajuan bangsa tersebut, apakah tergolong sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang (Basri dan Munandar, 2009: 88).

Beberapa negara mengalami lompatan dalam perolehan nilai HDI/IPM di antaranya karena memacu dunia pendidikan. Hal ini seperti pengalaman Jepang. Bangsa Jepang, yang porak-poranda akibat kekalahannya pada Perang Dunia II, segera mengalami *recovery* (pemulihan) dalam waktu relatif singkat, bahkan mengalami kebangkitan dan lompatan melampau negara-negara sekutu yang menjadi pesaing dan pemenang perang secara

militer. Salah satu kunci keberhasilan Jepang di dalam hal ini adalah pendidikan. Konon, begitu Jepang hancur setelah dua kota utamanya -- Hiroshima dan Nagasaki-- dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu pada medio Agustus 1945, yang pertama-tama ditanyakan oleh Kaisar Hirohito -- pemimpin tertinggi bangsa Jepang-- adalah berapa guru yang masih hidup? Dari sekian guru yang masih tersisa tersebut, Jepang menata kembali dunia pendidikannya dan ternyata mampu bangkit kembali secara cepat. Tentu saja, hal ini juga diikuti langkah-langkah konkret di dalam hal kebijakan pendidikan, sebagaimana diungkap oleh pakar pendidikan kontemporer, I.N. Thut dan Don Adams, menerapkan strategi memadukan “yang asli dan yang imitasi”, meliputi lima paket ketegori kebijakan pendidikan, yaitu (1) demiliterisasi, (2) individualisasi, (3) desentralisasi kontrol, (4) perluasan kesempatan pendidikan, dan (5) reformasi kurikulum (Thut dan Adams, 2005: 488-511).

Negara tetangga, Malaysia, mengalami lompatan yang signifikan sejak dua dasawarsa terakhir ini juga karena fokus perhatiannya yang kuat terhadap dunia pendidikan. Lompatan yang dialami Malaysia ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi baru yang diterapkan pada tahun 1970-an silam oleh Tun Abdul Razak, perdana menteri kala itu (Said, 2010: 4). Sejumlah besar generasi muda terpelajar Malaysia disekolahkan ke Amerika dan negara-negara Eropa Barat oleh menteri pendidikan kala itu, Mahathir Mohamad (kelak menjadi perdana menteri yang cukup sukses dan mampu membawa Malaysia ke arah kemajuan ekonomi dan politik yang signifikan), yang langkah-langkap politiknya dikenal sebagai “*A Revolution Par Excellence*” (Maidin, 2003: 69). Untuk memenuhi kebutuhan guru di dalam negeri,

pemerintah Malaysia “mengimpor” sejumlah besar guru dari Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia hampir bisa dikatakan mengalami stagnasi. Setelah anak-anak pintar dari Melayu tersebut sudah lulus doktor, mereka kembali ke tanah airnya untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah-sekolah dan sejumlah universitas di Malaysia. Para guru dari Indonesia pun dipulangkan, diganti dengan tenaga kasar untuk menjadi TKI guna mendukung pembangunan infrastruktur di negeri jiran tersebut.

Bangsa Indonesia bukanlah suatu bangsa yang tidak sadar arti pentingnya kemajuan dunia pendidikan. Para *founding father* (pendiri) negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah merumuskan bahwa salah satu tujuan negara --sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945-- adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa hingga lebih dari 65 tahun Indonesia merdeka, tingkat HDI/IPM yang dicapai oleh bangsa Indonesia tidak kunjung membaik, bahkan cenderung menurun. Hal ini bisa dilihat dalam laporan *Human Development Report* dari United Nations Development Programme (UNDP), yang dirilis pada Oktober 2009. Peringkat HDI/IPM Indonesia menurun dari posisi ke-107 pada 2006 menjadi peringkat ke-111 pada tahun 2009 dari 182 negara. Bahkan, untuk kawasan ASEAN pun, Indonesia hanya unggul dari Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Singapura yang menduduki peringkat ke-23, Brunei (30), Malaysia (66), Thailand (86), dan Filipina di peringkat 105 (Yanuarti, *Gatra*, Nomor 50, edisi 15 Oktober 2009). Angka HDI/IPM Indonesia tercatat 0,734 sehingga berada di garis batas antara negara berkembang dan terbelakang.

Mengapa kualitas SDM di Indonesia --sebagaimana tercermin di dalam perolehan nilai dan peringkat HDI/IPM-- cenderung rendah? Hal ini --sekali lagi-- di antaranya terkait dengan potret buram kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam kaitan ini, Indonesia setidaknya mengalami tiga masalah struktural. *Pertama*, masih lemahnya kinerja pendidikan (berupa intelektualitas siswa di semua tingkatan) maupun kualitas pendidikan itu sendiri. *Kedua*, keterbatasan infrastruktur keras (*hard infrastructure*), baik infrastruktur fisik maupun nonfisik. Dan *ketiga*, kelemahan kerangka kelembagaan (*institutional framework*) atau biasa disebut infrastruktur lunak atau *soft infrastructure* (Basri dan Munandar, 2009: 87). Dalam hal ini, diperlukan paradigma baru dalam kebijakan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pola-pola lama yang cenderung sentralistik harus diubah menuju pola-pola yang lebih desentralistik. Kebijakan yang semua cenderung dilakukan semula cenderung *top down* (dari atas ke bawah) harus diubah menjadi *bottom up* (dari bawah ke atas). Demokratisasi di segala bidang --termasuk di dalamnya demokratisasi di dunia pendidikan-- sudah menjadi hal yang tidak terelakkan lagi.

Menyangkut perubahan paradigma ini, transformasi pendidikan juga harus menyentuh pada level nilai dan strategis. Perbaikan di bidang manajemen pendidikan/sekolah menduduki posisi yang cukup penting dalam hal ini. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) telah memberikan arah pengembangan manajemen institusi (pendidikan) dengan paradigma baru yang mencakup 10 unsur karakteristik manajemen yang di antaranya yang pertama dan pada intinya untuk

mendukung model manajemen institusi (pendidikan) berwawasan *entrepreneurship* (kewirausahaan), yaitu suatu kemampuan dan etos yang terbuka (demokratis) untuk “menciptakan” kegiatan produktif bagi institusi dan masyarakatnya (Mutrofin, 2007: 127-128). Hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, jika kebijakan pendidikan memberikan peluang institusi pendidikan hingga level sekolah yang memiliki kewenangan (otonomi) yang cukup untuk mengatur diri sendiri.

Peristiwa Reformasi 1998 mengubah secara signifikan arah konstelasi kehidupan sistem politik kenegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut di antaranya tercermin dari orientasi penyelenggaraan negara yang semula cenderung sentralistik berubah pada model yang desentralistik. Perubahan arah tersebut semakin jelas ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) -- sebagai lembaga tertinggi negara-- mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah, yang kemudian disusul lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Semua produk perundang-undangan tersebut mengamankan penyelenggaraan pemerintahan desentralistik dengan menganut sistem otonomi daerah dengan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) sebagai titik fokus penyelenggara pemerintahan otonomi (Basri & Munandar, 2009: 451). Hal-hal yang dulu menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, kini sebagian besar telah melimpah ke daerah.

Gelombang desentralisasi dan otonomi daerah tersebut mengimbas ke dunia pendidikan. Sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999,

kewenangan bidang pendidikan termasuk yang dilimpahkan ke pemerintah daerah (Tilaar, 2002: 845; Aqib, 2010: 1). Kewenangan yang dipertahankan oleh pemerintah pusat tinggal pada lima bidang strategis, yaitu politik/hubungan luar negeri, agama, keuangan, pertahanan dan keamanan, serta hukum/peradilan (Basri & Munandar, 2009: 451). Otonomi daerah dan otonomi pendidikan ini pada gilirannya akan mendorong terciptanya otonomisasi pendidikan, yaitu terciptanya institusi pendidikan sebagai mercusuar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Pakar pendidikan, Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed., membedakan pengertian otonomi daerah dan otonomi pendidikan dengan otonomisasi pendidikan. Otonomi daerah memang memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah di dalam hal manajemen pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, tetapi hal ini bukan berarti pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengintervensi perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian pula dengan otonomi pendidikan, pada hakikatnya, lebih banyak menyentuh aspek kemandirian manajemen/pengelolaan suatu lembaga pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kebebasan akademik tetap menjadi wewenang eksklusif dunia pendidikan yang sudah semestinya terbebas dari kepentingan politik. Justru, terselenggaranya otonomi daerah dan otonomi pendidikan pada gilirannya akan mendorong terciptanya otonomisasi pendidikan (Tilaar, 2002: 485). Memang, dunia pendidikan bukanlah wilayah yang sepenuhnya bebas nilai, nihil dari segala kepentingan politik/ideologi, namun --sesuai dengan semangat mahzab pendidikan berparadigma kritis--

politik pendidikan sudah selayaknya diarahkan untuk melakukan refleksi kritis yang berujung pada transformasi sosial (Fakih dalam O'neil, 2001: xvi).

Tonggak penting reformasi di bidang pendidikan adalah diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas). UU Sisdiknas mengamanatkan terselenggaranya pola pengelolaan lembaga pendidikan berasaskan *entrepreneurship* (kewirausahaan). Di antaranya, lembaga pendidikan didorong untuk mampu menjalankan otonomi manajemen pendidikan secara maksimal melalui kebijakan penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah atau *school based management*. Pasal 51, ayat (1) UU Sisdiknas menyebutkan: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”

Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah suatu konsep pengelolaan institusi pendidikan yang memberi otonomi secara khusus kepada sekolah yang bersangkutan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang harmonis antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah (Mulyasa, 2003: 9). Atau, pada intinya, MBS adalah terjadinya pergeseran kewenangan pengelolaan sekolah dari yang semula di tangan birokrasi pemerintah pusat atau pun daerah menuju ke lingkungan sekolah (Nurcholis, 2006: 2). MBS menjadi gejala reformasi (pembaruan) pendidikan sejak tahun 1970-an, kini merambah di sejumlah negara di dunia dan menunjukkan hasil yang positif, seperti di Amerika Serikat,

Prancis, Kanada, Hong Kong, Australia, Inggris, Nikaragua, Selandia Baru, El Salvador, Madagaskar, dan sebagainya (Nurcholis, 2006: 86-107). Indonesia baru mulai memperkenalkan dan mengadopsi konsep MBS tersebut sejak awal tahun 2000-an.

Dalam konteks MBS, kepala sekolah tidak hanya dituntut mampu memberdayakan sumber daya internal sekolah, namun juga sumber daya eksternal sekolah. Secara internal sekolah memiliki perangkat guru, murid, kurikulum, sarana dan prasarana. Sementara secara eksternal sekolah memiliki dan berhubungan dengan instansi lain, baik secara vertikal maupun horisontal, yang sama-sama ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendek kata, kepala sekolah dituntut mampu memberdayakan dan mengakomodasi potensi seluruh anggota *stakeholder* sekolah, yaitu orang-orang atau kelompok atau pihak yang memperoleh pengaruh langsung dari keberadaan institusi sekolah. Agar kualitas pendidikan secara nasional tetap terjaga, pemerintah dalam hal ini menetapkan Standar Pendidikan Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Standar Pendidikan Nasional (SNP) tersebut meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (Aqib, 2010: 1).

Dengan pemberlakuan otonomi pendidikan tersebut, setiap institusi sekolah memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan dirinya, menentukan kekhasan, nilai-nilai keunggulan hingga ke masalah kebijakan model pengelolaan sekolah, sebatas tetap mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional (SPN) tersebut. Di dalam upaya memajukan lembaga sekolah tersebut, posisi kepala sekolah menduduki kedudukan yang sangat penting,

bahkan boleh di bilang sebagai “*the key person*” atau sosok kunci penentu keberhasilan sekolah (Mulyasa, 2004: 42). Kekuatan kepemimpinan kepala sekolah menjadi kunci utama penentu bagaimana sekolah tersebut mencapai kesuksesan, baik dari sisi akademik, kultur sekolah maupun pengembangan fisik sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut memiliki daya kreativitas dan inovatif yang tinggi --dua kompetensi dasar *intrepreneurship* atau kewirausahaan (Suryana, 2006: 2).

Pemerintah pun saat ini sudah memasukan aspek kewirausahaan dalam penentuan dimensi kompetensi kepala sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan terdapat lima dimensi kompetensi yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Terkait dimensi kompetensi kewirausahaan, kepala sekolah diharuskan memiliki kemampuan *entrepreneurship* dengan lima indikator sebagai berikut ini. (a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah. (b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. (c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. (d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. (e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

Namun, kenyataan di lapangan, dunia pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas kepala sekolah. Laporan

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) --sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)-- pada 2008 memperkirakan 70 persen dari 250.000 kepala sekolah di Indonesia tidak kompeten. Hal ini seperti diungkapkan oleh Surya Dharma, Direktur Tenaga Kependidikan kala itu. Dan kelemahan utama kepala sekolah, menurut Surya Dharma, pada umumnya menyangkut kompetensi manajerial dan supervisi. Padahal, dua kompetensi tersebut merupakan prasyarat utama pengelolaan sekolah yang baik (*Tempo*, edisi 12 Agustus 2008). Jika pada dua hal kompetensi (manajerial dan supervisi) tersebut lemah, dapat dipastikan pada aspek kompetensi kewirausahaan (*entrepreneurship*) lebih lemah lagi, karena kompetensi kewirausahaan jelas menuntut tuntas terlebih dulu pada aspek manajerial dan supervisi.

Berangkat dari kenyataan di atas, peneliti terdorong untuk meneliti kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta. Pemilihan SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta sebagai lokasi penelitian ini lebih didorong oleh prestasi, baik dari sisi akademik maupun dimensi manajerial, yang telah dicapai oleh sekolah tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sosok kepala sekolah di sekolah tersebut. Dan keberhasilan pengelolaan SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta telah “menginspirasi”, atau dalam istilah Penerbit Suara Muhammadiyah “menyinari”, sejumlah sekolah (SD/MI) yang lain di sejumlah daerah, seperti di Boyolali, Karanganyar, Kudus, Majenang, Wonogiri, dan tempat-tempat lain. Sejumlah sekolah (SD/MI) swasta di sejumlah daerah tersebut (pada umumnya sekolah

di bawah naungan organisasi Muhammadiyah) terpaksa “mengimpor” (baca: mendatangkan) Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta untuk mengelola sekolah-sekolah tersebut agar terhindar dari kematian. Alhasil, dalam waktu tidak relatif lama, sekolah-sekolah yang hampir mati tersebut bisa bernapas lega lagi, bahkan tumbuh menjadi sekolah unggulan. Hal ini seperti dialami oleh SD Muhammadiyah Boyolali (kemudian menjadi SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali) dan SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan, Karanganyar (Ali, 2009: iii-vi).

B. Fokus Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini difokuskan model kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarrat, Surakarta. Bertolak dari fokus permasalahan tersebut, selanjutnya ditetapkan sub-sub fokus, sekaligus sebagai pembatasan permasalahan, sebagai berikut ini.

1. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan, dan *assesment* terhadap Kepala SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta?
2. Bagaimana aspek-aspek yang menjadi sasaran atau bidang garapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan kewirausahaan?
3. Hambatan-hambatan dan dukungan macam apa sajakah dalam memengaruhi keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta.

Secara khusus dan terinci, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan model kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan, dan *assesment* terhadap Kepala SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta.
2. Mendeskripsikan aspek-aspek yang menjadi sasaran atau bidang garapan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan kewirausahaan.
3. Mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam implementasi model dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi dua hal, yakni manfaat akademis (teoretis) dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis/Teoretis
 - a. Pengembangan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya, khususnya dalam bidang ilmu manajemen pendidikan.
 - b. Menambah kajian keilmuan tentang teori pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah berwawasan kewirausahaan.

- c. Sebagai bahan acuan bagi peminat pendidikan dan peneliti pendidikan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Kepala Sekolah

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai kepala sekolah, khususnya terkait kepemimpinan kepala sekolah berwawasan kewirausahaan.
- 2) Menjadi bahan tambahan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan kepala sekolah di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta.

b. Manfaat bagi Guru

- 1) Menambah wawasan dalam meningkatkan kinerja guru sesuai dengan profesi dan bidang ilmu yang dimiliki, sehingga lebih kreatif dan inovatif (sesuai dengan semangat kewirausahaan).
- 2) Mengubah persepsi guru dalam memahami pengertian dan manfaat kepemimpinan sekolah berwawasan kewirausahaan, sehingga guru bisa menyesuaikan diri dengan pola atau model kepemimpinan tersebut.

c. Manfaat bagi Organisasi Penyelenggara

- 1) Memberikan masukan positif bagi organisasi Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan ke depan.
- 2) Sebagai dokumentasi dalam menambah khasanah model pendidikan di lingkungan lembaga/organisasi Muhammadiyah.

E. Daftar Istilah

1. Kepemimpinan (*leadership*) adalah suatu proses yang disengaja berkaitan dengan kemampuan atau kesiapan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok guna membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas, mengarahkan, dan kalau perlu memaksakan, sehingga mereka berbuat secara maksimal guna tercapai atau terlampainya tujuan kelompok atau organisasi.
2. Kepala sekolah adalah pemimpin di tingkat lembaga satuan pendidikan atau sekolah yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi manajemen di tingkat lembaga satuan pendidikan tersebut sehingga proses manajerial berjalan secara baik dan efektif, baik di bidang akademis maupun nonakademis, guna mencapai atau terlampainya visi, misi, dan tujuan sekolah.
3. Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.
4. Kepemimpinan kewirausahaan adalah suatu praktek kepemimpinan yang menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan di dalam implementasinya.
5. Kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan adalah suatu praktek kepemimpinan pendidikan di lingkungan sekolah atau di tingkat satuan pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan sebagai basis implementasinya.